

URUSAN WAJIB

Alokasi belanja urusan wajib sebesar Rp.903.896.935.816,40 direalisasikan sebesar Rp.826.303.202.024,00 atau 87,82%. Belanja tersebut digunakan untuk mendanai 26 urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan 138 program sebagaimana uraian dibawah ini.

1. Urusan Pendidikan.

Berdasarkan rekapitulasi, dari alokasi belanja langsung urusan pendidikan sebesar Rp.63.221.824.668,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.58.881.175.265,00 atau 93,13%. Hampir seluruh program pada urusan wajib pendidikan ini dilaksanakan oleh Disdik, namun terdapat pula program yang dilaksanakan bersama SKPD lain yaitu Program Pendidikan Menengah dan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Dua Belas Tahun oleh Disdik dan DCKTRK.

Program, rencana dan realisasi anggarannya diuraikan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.2.287.465.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp.2.117.035.248,00 atau 95,17%; dilaksanakan oleh Disdik.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.727.184.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp.631.720.185,00 atau 88,87%; dilaksanakan oleh Disdik.
- c. Program Peningkatan Displin Aparatur, alokasi anggaran Rp.27.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.26.951.400,00 atau 99,82%; dilaksanakan oleh Disdik.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran Rp.85.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.85.000.000,00 atau 100,00%; dilaksanakan oleh Disdik
- e. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.10.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,00 atau 100,00%; dilaksanakan oleh Disdik
- f. Program Adminstrasi Persekolahan, alokasi anggaran Rp.15.346.070.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp.13.461.250.188,00 atau 87,62%; dilaksanakan oleh Disdik
- g. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD), alokasi anggaran Rp.761.658.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp.728.001.235,00 atau 95,58%; dilaksanakan oleh Disdik
- h. Program Pendidikan Anak Usia Dini, alokasi anggaran Rp.853.160.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.804.879.900,00 atau 94,34%; dilaksanakan oleh Disdik.

- i. Program Pendidikan Menengah, alokasi anggaran sebesar Rp.9.896.250.000,00 terealisasi sebesar Rp.9.534.589.392,00 atau 96,35%; dilaksanakan oleh Disdik dan DCKTRK.
 - j. Program Pendidikan Non Formal, alokasi anggaran Rp.759.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.758.036.000,00 atau 99,87%; dilaksanakan oleh Disdik.
 - k. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, alokasi anggaran Rp.750.931.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.738.041.000,00 atau 98,28%; dilaksanakan oleh Disdik.
 - l. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, alokasi anggaran Rp.750.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.718.737.027,00 atau 95,83%; dilaksanakan oleh Disdik.
 - m. Program Peningkatan Mutu dan Prestasi Belajar, dengan anggaran sebesar Rp.2.102.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.2.095.933.450,00 atau 99,71%; dilaksanakan oleh Disdik.
 - n. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Dua Belas Tahun, dengan anggaran Rp.28.848.104.668,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.27.111.005.240,00 atau 93,98%; dilaksanakan oleh Disdik dan DCKTRK.
 - o. Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Bidang Pendidikan, alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.139.308.000,00 atau 92,87%; dilaksanakan oleh DCKTRK.
2. Urusan Kesehatan.

Anggaran urusan wajib kesehatan sebesar Rp.239.046.517.135,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.201,090,526,957,00 atau 84,12%. Program dalam urusan wajib kesehatan ini dilaksanakan oleh Dinkes, RSUD dr. Soekardjo, Setda, DCKTRK dan Kecamatan.

Program-program tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.19.720.407.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.15.899.436.339,00 atau 80,62%; dilaksanakan oleh Dinkes dan RSUD dr. Soekardjo.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.4.238.643.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.2.862.819.655,00 atau 67,54%; dilaksanakan oleh Dinkes dan RSUD dr. Soekardjo.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp.911.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.676.503.315,00 atau 74,26%; dilaksanakan oleh Dinkes dan RSUD dr. Soekardjo.

- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, alokasi anggaran Rp.1.616.542.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.1.414.048.000,00 atau 87,47%; dilaksanakan oleh RSUD dr. Soekardjo.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran Rp.80.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.76.040.110,00 atau 95,05%; dilaksanakan oleh Dinkes dan RSUD dr. Soekardjo.
- f. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.20.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.19.835.450,00 atau 99,18%; dilaksanakan oleh Dinkes dan RSUD dr. Soekardjo.
- g. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya, alokasi anggaran Rp.27.942.730.712,00 realisasi anggaran sebesar Rp.25.579.955.540,00 atau 91,54%; dilaksanakan oleh Dinkes.
- h. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Laboratorium dan Perbekalan Kesehatan, alokasi anggaran Rp.444.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.429.815.414,00 atau 96,81%; dilaksanakan oleh Dinkes.
- i. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, dari anggaran sebesar Rp.3.514.247.195,00 dapat direalisasikan Rp.2.013.929.016,00 atau 98,61%; dilaksanakan oleh Dinkes.
- j. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dari anggaran sebesar Rp.4.046.224.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.3.857.201.135,00 atau 95,33%; dilaksanakan oleh Dinkes.
- k. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dari anggaran Rp.1.606.062.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.567.477.000,00 atau 97,60%; dilaksanakan oleh Dinkes, Kec. Indihiang, Kec. Tawang dan Kec. Cipedes.
- l. Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dari anggaran Rp.763.241.010,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.747.081.300,00 atau 97,88%; dilaksanakan oleh Dinkes.
- m. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, alokasi anggaran Rp.1.939.394.000,00 terealisasi Rp.1.877.039.777,00 atau 96,78%. Program ini dilaksanakan oleh Dinkes, Setda dan seluruh Kecamatan.
- n. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dari anggaran Rp.1.432.946.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.339.557.584,00 atau 93,48%; dilaksanakan oleh Dinkes.
- o. Program Standarisasi pelayanan kesehatan, alokasi anggaran Rp.1.101.680.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.097.633.550,00 atau 99,63%; dilaksanakan oleh Dinkes.
- p. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, dari anggaran Rp.18.131.807.600,00 direalisasikan sebesar Rp.12.004.321.000,00 atau 66,21%; dilaksanakan oleh Dinkes.

- q. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya dari anggaran Rp.6.790.250.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.6.144.131.682,00 atau 90,48%; dilaksanakan oleh Dinkes dan DCKTRK.
- r. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata, dari anggaran Rp.62.024.324.500,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.49.555.603.052,00 atau 79,90%; dilaksanakan oleh Dinkes, dan RSUD dr. Soekardjo.
- s. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata, dengan anggaran sebesar Rp.4.203.277.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.614.389.831,00 atau 85,99%; dilaksanakan oleh RSUD dr. Soekardjo.
- t. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, alokasi anggaran sebesar Rp.22.181.095.813,00 terealisasi sebesar Rp.17.108.325.009,00 atau 77,13%; dilaksanakan oleh Dinkes dan RSUD dr. Soekardjo.
- u. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita, dari anggaran Rp.110.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.109.718.548,00 atau 99,74%; dilaksanakan oleh Dinkes.
- v. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, dari anggaran Rp. 360.507.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.337.492.000,00 atau 93,62%; dilaksanakan oleh Dinkes.
- w. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan, dari anggaran Rp.195.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.180.811.800,00 atau 92,72%; dilaksanakan oleh Dinkes dan Setda.
- x. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, dari anggaran Rp.551.945.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.543.188.880,00 atau 98,41%; dilaksanakan oleh Dinkes.
- y. Program Peranserta Peningkatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, anggaran Rp.30.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.30.000.000,00 atau 100,00%; dilaksanakan oleh Dinkes.
- z. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan dari anggaran Rp.13.254.601.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.12.639.967.050,00 atau 94,80%; dilaksanakan oleh Dinkes dan DCKTRK.

aa. Program Standarisasi administrasi kesehatan, dari alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.71.386.000,00 atau 95,18%; dilaksanakan oleh RSUD dr. Soekardjo.

bb. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit, alokasi anggaran sebesar Rp.41.544.079.500,00 terealisasi sebesar Rp.37.792.500.741,00 atau 90,97%; dilaksanakan oleh RSUD dr. Soekardjo.

3. Urusan Pekerjaan Umum.

Alokasi anggaran urusan wajib pekerjaan umum sebesar Rp.208.964.469.000,00 terealisasi sebesar Rp.198.834.208.642,00 atau 95,15 %. Program dalam urusan wajib pekerjaan umum ini dilaksanakan oleh DBMPPE dan DCKTRK.

Program-program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.1.491.451.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.1.369.865.225,00 atau 91,85%; dilaksanakan oleh DBMPPE dan DCKTRK.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.1.351.421.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.1.172.612.427,00 atau 86,77%; dilaksanakan oleh DBMPPE dan DCKTRK.

c. Program Peningkatan Displin Aparatur, alokasi anggaran Rp.55.163.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.53.883.500,00 atau 97,68%; dilaksanakan oleh DBMPPE.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran Rp.110.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.109.507.300,00 atau 99,55%; dilaksanakan oleh DBMPPE dan DCKTRK.

e. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.20.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.19.727.700,00 atau 98,64%; dilaksanakan oleh DBMPPE dan DCKTRK.

f. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, alokasi anggaran Rp.27.019.560.500,00 terealisasi sebesar Rp.24.120.768.500,00 atau 89,27%; dilaksanakan oleh DBMPPE.

g. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, alokasi anggaran sebesar Rp.11.898.815.000,00 terealisasi sebesar Rp.11.758.453.700,00 atau 98,82%; dilaksanakan oleh DBMPPE dan DCKTRK.

h. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, alokasi anggaran Rp.14.305.002.000,00 terealisasi sebesar Rp.13.429.638.041,00 atau 93,88%; dilaksanakan oleh DBMPPE.

- i. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan, alokasi anggaran Rp.1.972.300.500,00 terealisasi sebesar Rp.1.855.654.650,00 atau 94,09%; dilaksanakan oleh DBMPPE.
 - j. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, alokasi anggaran Rp.36.682.767.250,00 terealisasi Rp.35.235.261.400,00 atau 96,05%; dilaksanakan oleh DBMPPE.
 - k. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, alokasi anggaran Rp.1.562.182.000,00 terealisasi Rp.1.530.475.000,00 atau 97,97%; dilaksanakan oleh DBMPPE.
 - l. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, alokasi anggaran Rp.6.721.763.750,00 terealisasi Rp.6.578.247.124,00 atau 97,86%; dilaksanakan oleh DCKTRK.
 - m. Program Pengendalian Banjir, alokasi anggaran Rp.6.299.066.000,00 terealisasi Rp.6.247.169.675,00 atau 99,18%; dilaksanakan oleh DBMPPE.
 - n. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, alokasi anggaran Rp.329.167.000,00 terealisasi Rp.327.034.300,00 atau 99,35%; dilaksanakan oleh DCKTRK.
 - o. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, alokasi sebesar Rp.96.317.710.000,00 terealisasi Rp.93.418.582.700,00 atau 96,99%; dilaksanakan oleh DBMPPE.
 - p. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong, alokasi anggaran Rp.948.800.000,00 terealisasi sebesar Rp.945.154.900,00 atau 99,62%; dilaksanakan oleh DCKTRK dan DBMPPE.
 - q. Program Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar, alokasi anggaran Rp.1.879.300.000,00 terealisasi Rp.662.172.500,00 atau 35,24%; dilaksanakan oleh DCKTRK.
4. Urusan Perumahan.
- Alokasi anggaran urusan wajib perumahan sebesar Rp.57.565.586.400,00 terealisasi sebesar Rp.55.663.014.367,00 atau 96,69%. Program dalam rangka melaksanakan urusan wajib ini adalah sebagai berikut:
- a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, alokasi anggaran Rp.844.849.000,00 terealisasi Rp.704.620.000,00 atau 83,40%; yang dilaksanakan oleh DCKTRK.
 - b. Program Pengelolaan Areal Pemakaman, alokasi anggaran Rp.385.000.000,00 terealisasi Rp.369.368.500,00 atau 95,94%; dilaksanakan oleh DCKTRK dan Dinsosnakertrans.

- c. Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pertamanan dan Pemakaman, alokasi anggaran Rp.972.388.800,00 terealisasi Rp.917.108.550,00 atau 94,32%; dilaksanakan oleh DCKTRK.
 - d. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman, alokasi anggaran sebesar Rp.55.363.348.600,00 terealisasi Rp.53.671.917.317,00 atau 96,94%; dilaksanakan oleh DCKTRK dan Bappeda.
5. Urusan Penataan Ruang.
- Alokasi anggaran urusan wajib penataan ruang sebesar Rp.2.246.750.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.2.055.305.151,00 atau 91,48%. Program dalam rangka melaksanakan urusan wajib ini adalah sebagai berikut:
- a. Program Perencanaan Tata Ruang, alokasi anggaran Rp.46.750.000,00 terealisasi Rp.46.750.000,00 atau 100,00%; dilaksanakan oleh DCKTRK.
 - b. Program Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan (Tata Kota), alokasi anggaran Rp.1.065.000.000,00 terealisasi Rp.943.062.240,00 atau 88,55%; dilaksanakan oleh Bappeda dan DCKTRK.
 - c. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, alokasi anggaran Rp.1.135.000.000,00 terealisasi Rp.1.065.492.911,00 atau 93,88%; dilaksanakan oleh DCKTRK dan Bappeda.
6. Urusan Perencanaan Pembangunan.
- Anggaran urusan wajib perencanaan pembangunan sebesar Rp.9.736.799.555,00 terealisasi sebesar Rp.9.091.972.932,00 atau 93,38%. Program dalam rangka melaksanakan urusan wajib ini adalah sebagai berikut:
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.1.196.157.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.1.132.669.575,00 atau 94,69%; dilaksanakan oleh Bappeda.
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.1.430.718.900,00 realisasi anggaran sebesar Rp.1.302.135.050,00 atau 91,01%; dilaksanakan oleh Bappeda.
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp.44.975.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.44.956.000,00 atau 99,96%; dilaksanakan oleh Bappeda.
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, alokasi anggaran Rp.20.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.19.170.500,00 atau 95,85%; dilaksanakan oleh Bappeda.
 - e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran Rp.55.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.50.875.700,00 atau 92,50%; dilaksanakan oleh Bappeda.
 - f. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.15.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.13.650.000,00 atau 91,00%; dilaksanakan oleh Bappeda.

- g. Program Pengembangan Data/ Informasi, alokasi anggaran Rp.1.716.011.655,00 terealisasi Rp.1.563.383.063,00 atau 91,11%; dilaksanakan oleh Bappeda, Setda dan Kecamatan Bungursari.
- h. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 realisasi Rp.47.704.000,00 atau 95,41%; dilaksanakan oleh Bappeda.
- i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran Rp.4.449.837.000,00 terealisasi Rp.4.242.975.094,00 atau 95,35%; dilaksanakan oleh Disdik; Dinkes; DBMPPE; DCKTRK; Bappeda; Dishubkominfo; KLH; Disdukcapil; Badan KBPMP3A; Dinsosnakertrans; Dinas KUMKM Perindag; Disbudparpora; Kantor Kesbangpol; seluruh Kantor Kecamatan; Satpol PP dan Linmas; Karpusda; dan Distankanhut.
- j. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, alokasi anggaran Rp.399.100.000,00 terealisasi Rp.376.690.650,00 atau 94,39%; dilaksanakan oleh Bappeda dan Setda.
- k. Program Perencanaan Sosial Budaya, anggaran Rp.360.000.000,00 terealisasi Rp.297.763.300,00 atau 82,7%; dilaksanakan oleh Bappeda.

7. Urusan Perhubungan.

Anggaran urusan wajib perhubungan sebesar Rp.31.071.440.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.30.363.412.332,00 atau 97,72%. Sebagian besar program untuk memenuhi urusan wajib ini dilaksanakan oleh Dishubkominfo, kecuali Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas dilaksanakan oleh Dishubkominfo dan Setda.

Program dalam rangka melaksanakan urusan wajib ini adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.20.435.595.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.20.058.050.205,00 atau 98,15%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.1.301.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.1.163.229.250,00 atau 89,41%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp.60.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.59.708.000,00 atau 99,51%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran Rp.45.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.44.930.000,00 atau 99,84%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.

- e. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.10.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.9.800.000,00 atau 98,00%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.
 - f. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, alokasi anggaran Rp.1.007.995.000,00 terealisasi Rp.1.001.445.120,00 atau 99,35%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.
 - g. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, alokasi anggaran Rp.260.000.000,00 terealisasi Rp.256.525.700,00 atau 98,66%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.
 - h. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, alokasi anggaran Rp.7.016.400.000,00 terealisasi Rp.6.870.171.635,00 atau 97,92%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo dan Setda.
 - i. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, alokasi anggaran Rp.296.250.000,00 terealisasi Rp.283.812.400,00 atau 95,80%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.
 - j. Program Peningkatan Pelayanan Lalu lintas, alokasi anggaran Rp.339.500.000,00 terealisasi Rp.336.802.297,00 atau 99,21%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.
 - k. Program Peningkatan Optimalisasi Perhubungan, alokasi anggaran Rp.299.700.000,00 terealisasi Rp.278.937.725,00 atau 93,07%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.
8. Urusan Lingkungan Hidup.
- Anggaran urusan wajib lingkungan hidup sebesar Rp.14.745.912.300,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.14.012.740.370,00 atau 95,03%. Program untuk memenuhi urusan wajib ini dilaksanakan oleh KLH, Bappeda dan DCKTRK yaitu :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.386.701.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.357.709.205,00 atau 92,50%; dilaksanakan oleh KLH.
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.136.250.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.131.716.513,00 atau 96,67%; dilaksanakan oleh KLH.
 - c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran Rp.20.500.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.20.500.000,00 atau 100,00%; dilaksanakan oleh KLH.
 - d. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.7.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.7.000.000,00 atau 100,00%; dilaksanakan oleh KLH.
 - e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, alokasi anggaran Rp.9.237.627.300,00 terealisasi sebesar Rp.8.969.969.302,00 atau 97,10%; dilaksanakan oleh DCKTRK.

- f. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, alokasi anggaran Rp.1.239.624.000,00 terealisasi Rp.1.227.156.300,00 atau 98,99%; dilaksanakan oleh DCKTRK, Bappeda dan KLH.
- g. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, alokasi anggaran Rp.550.000.000,00 terealisasi Rp.534.170.000,00 atau 97,12%; dilaksanakan KLH.
- h. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, alokasi anggaran Rp.65.000.000,00 realisasi Rp.64.730.850,00 atau 99,59%; dilaksanakan oleh KLH.
- i. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), alokasi anggaran Rp.3.103.210.000,00 terealisasi Rp.2.699.788.200,00 atau 87,00%; dilaksanakan oleh DCKTRK dan Bappeda.

9. Urusan Pertanahan.

Program untuk memenuhi pertanahan yaitu Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dilaksanakan oleh Setda dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.671.074.000,00 terealisasi sebesar Rp.635.068.200,00 atau 94,63%.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.

Anggaran urusan wajib kependudukan dan catatan sipil dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.2.386.703.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.169.495.111,00 atau 90,90%. Program untuk memenuhi urusan wajib ini dilaksanakan oleh Disdukcapil, yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.1.049.361.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.922.217.822,00 atau 87,88%; dilaksanakan oleh Disdukcapil.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.450.627.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.401.924.015,00 atau 89,19%; dilaksanakan oleh Disdukcapil.
- c. Program Peningkatan Displin Aparatur, alokasi anggaran Rp.31.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.30.400.000,00 atau 98,06%; dilaksanakan oleh Disdukcapil.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, alokasi anggaran Rp.250.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.238.798.174,00 atau 95,52%; dilaksanakan oleh Disdukcapil.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran Rp.50.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.49.050.500,00 atau 98,10%; dilaksanakan oleh Disdukcapil.
- f. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.20.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.18.993.000,00 atau 94,97%; dilaksanakan oleh Disdukcapil.
- g. Program Penataan Administrasi Kependudukan, alokasi anggaran Rp.554.715.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.525.668.600,00 atau 94,76%; dilaksanakan oleh Disdukcapil.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dengan alokasi anggaran untuk melaksanakan urusan wajib ini adalah Rp.516.403.405,00 terealisasi sebesar Rp.374.308.175,00 atau 72,48% dilaksanakan melalui :

- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan alokasi anggaran Rp.291.856.905,00 terealisasi Rp.216.480.725,00 atau 74,17%; dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh BKBMP3A.
- b. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dengan alokasi anggaran Rp.224.546.500,00 terealisasi Rp.157.827.450,00 atau 70,29%; dilaksanakan oleh BKBMP3A.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Program untuk memenuhi urusan wajib keluarga berencana dan keluarga sejahtera ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.709.435.500,00 terealisasi sebesar Rp.5.332.896.773,00 atau 93,40% melalui Program yaitu :

- c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.686.579.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp.656.942.689,00 atau 95,68%; dilaksanakan oleh BKBMP3A.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.223.328.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.196.558.219,00 atau 88,01%; dilaksanakan oleh BKBMP3A.
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran Rp.50.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.47.075.000,00 atau 94,15%; dilaksanakan oleh BKBMP3A.
- d. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.10.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.8.950.000,00 atau 89,50%; dilaksanakan oleh BKBMP3A.
- e. Program Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran Rp.1.374.391.000,00 terealisasi Rp.1.249.019.400,00 atau 90,88%; dilaksanakan oleh BKBMP3A.
- f. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga dengan alokasi anggaran Rp.2.968.137.000,00 terealisasi Rp.2.812.861.015,00 atau 94,77%; dilaksanakan oleh BKBMP3A dan Kecamatan.
- g. Program Kesehatan Reproduksi dengan alokasi anggaran Rp.397.000.000,00 terealisasi Rp.361.490.450,00 atau 91,06%; dilaksanakan oleh BKBMP3A.

13. Urusan Sosial.

Anggaran urusan wajib sosial sebesar Rp.7.586.559.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.7.189.818.706,00 atau 94,77%. Dengan uraian sebagai berikut :

- c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.1.077.702.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.1.014.688.168,00 atau 94,15%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans dan BPBD.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.565.465.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.492.536.660,00 atau 87,10%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans dan BPBD.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp.15.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,00,00 atau 100,00%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, alokasi anggaran Rp.100.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.99.475.000,00 atau 99,48%; dilaksanakan oleh BPBD.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran Rp.60.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.59.593.100,00 atau 99,32%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans dan BPBD.
- f. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.30.000.000,00,00 realisasi anggaran sebesar Rp.25.712.750,00 atau 85,71%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans dan BPBD.
- g. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, alokasi anggaran Rp.1.772.040.000,00 terealisasi Rp.1.713.752.625,00 atau 96,71%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans dan BPBD.
- h. Program Pembinaan Anak Terlantar, alokasi anggaran Rp.50.000.000,00 terealisasi Rp.49.975.000,00 atau 99,95%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans.
- i. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, alokasi anggaran Rp.62.860.000,00 terealisasi Rp.62.532.000,00 atau 99,48%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans.
- j. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya), alokasi anggaran Rp.100.000.000,00 terealisasi Rp.99.498.500,00 atau 99,50%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans.
- k. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, alokasi anggaran Rp.1.132.527.000,00 terealisasi Rp.999.848.948,00 atau 88,28%; dilaksanakan oleh BKBMP3A, Dinsosnakertrans, BPKBD, dan Setda.
- l. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, alokasi anggaran Rp.2.620.965.000,00 terealisasi Rp.2.557.182.455,00 atau 97,57%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans, Kecamatan Cibeureum dan Bappeda.

Selain program yang telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah tersebut, terdapat juga program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang PMKS yang merupakan program kebijakan *Top Down* yakni sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di daerah yakni **Program Keluarga Harapan (PKH)**. Penyaluran PKH Kota Tasikmalaya tahun 2016 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.1.

Alokasi dan Realisasi PKH Kota Tasikmalaya Tahun 2016

No	Tahap	Realisasi	
		Jmlh RTS	Anggaran
1	I	20.369	17.629.243.750
2	II	20.323	7.551.463.750
3	III	20.279	7.561.948.750
4	IV	20.163	7.467.680.000
5	Tahap I KPM Validasi	7.460	1.960.636.408
	JUMLAH		42.170.972.658

Sumber : UPPKH, 2016.

14. Urusan Ketenagakerjaan.

Anggaran urusan wajib ketenagakerjaan sebesar Rp.1.085.286.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.056.778.950,00 atau 97,37%. Seluruh program untuk memenuhi urusan wajib ini dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans yaitu :

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, alokasi anggaran Rp.472.649.000,00 terealisasi Rp.451.625.950,00 atau 95,55%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans.
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, alokasi anggaran Rp.150.749.000,00 terealisasi Rp.149.083.000,00 atau 98,89%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans.
- c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, alokasi anggaran Rp.461.888.000,00 terealisasi Rp.456.070.000,00 atau 98,74%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans.

15. Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.

Program untuk memenuhi urusan wajib koperasi dan usaha kecil menengah dengan anggaran sebesar Rp.4.873.661.000,00 realisasi sebesar Rp.4.634.795.227,00 atau 95,10% dengan uraian sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.793.589.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp.758.712.966,00 atau 95,57%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.792.101.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp.747.750.026,00 atau 94,40%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.

- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp.47.950.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.45.153.020,00 atau 94,17%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, alokasi anggaran Rp.80.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.79.210.000,00 atau 99,01%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran Rp.50.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.45.399.500,00 atau 90,80%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.
- f. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.10.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.9.495.000,00 atau 94,95%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.
- g. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, alokasi anggaran Rp.75.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.71.283.350,00 atau 95,04%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.
- h. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, alokasi anggaran Rp.275.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.264.206.018,00 atau 96,07%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.
- i. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, alokasi anggaran Rp.1.585.020.000,00 terealisasi Rp.1.505.714.101,00 atau 95,00%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.
- j. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, alokasi anggaran Rp.1.165.000.000,00 terealisasi Rp.1.108.121.246,00 atau 95,12%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag dan DCKTRK.

16. Urusan Penanaman Modal.

Urusan wajib penanaman modal di Kota Tasikmalaya dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.244.189.000,00 terealisasi Rp.3.120.371.991,00 atau 96,18%. Program ini dilaksanakan oleh BPMPPPT, yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.1.127.563.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.1.084.329.638,00 atau 96,17%; dilaksanakan oleh BPMPPPT.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.329.874.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.280.677.669,00 atau 85,09%; dilaksanakan oleh BPMPPPT.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp.72.800.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.71.995.000,00 atau 98,89%; dilaksanakan oleh BPMPPPT.

- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran Rp.35.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.34.844.650,00 atau 98,56%; dilaksanakan oleh BPMPT.
- e. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.10.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.9.936.000,00 atau 99,36%; dilaksanakan oleh BPMPT.
- f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, alokasi anggaran Rp.1.668.952.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.1.638.589.034,00 atau 98,18%; dilaksanakan oleh BPMPT.
- g. Program Peningkatan Pelayanan Publik, alokasi anggaran Rp.2.116.614.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.2.010.395.107,00 atau 94,98%; dilaksanakan oleh Bina Marga, Bappeda, Dishub, Disdukcapil, Setda, BPMPT, Kec. Cihideung, Dispenda.

17. Urusan Kebudayaan.

Anggaran urusan wajib kebudayaan sebesar Rp.4.664.716.200,00 terealisasi Rp.4.391.249.205,00 atau 94,14%. Program untuk memenuhi urusan wajib ini adalah :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.873.900.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.833.584.340,00 atau 95,39%; dilaksanakan oleh Disbudparpora.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.416.940.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.363.276.045,00 atau 87,13%; dilaksanakan oleh Disbudparpora.
- c. Program Peningkatan Displin Aparatur, alokasi anggaran Rp.25.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.24.948.000,00 atau 99,79%; dilaksanakan oleh Disbudparpora.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran Rp.35.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.29.730.000,00 atau 84,94%; dilaksanakan oleh Disbudparpora.
- e. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.10.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.8.250.000,00 atau 82,50%; dilaksanakan oleh Disbudparpora.
- f. Program Pengembangan Nilai Budaya, alokasi anggaran Rp.17.000.000,00 terealisasi Rp.16.950.000,00 atau 99,71%; dilaksanakan oleh Kecamatan Cihideung.
- g. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, alokasi anggaran Rp.3.286.876.200,00 terealisasi Rp.3.114.510.820,00 atau 94,76%; dilaksanakan oleh Disbudparpora.

18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga.

Anggaran urusan wajib kepemudaan dan olahraga sebesar Rp.11.520.447.500,00 dengan realisasi Rp.10.549.005.910,00 atau hanya 91,57%; dilaksanakan oleh Disbudparpora. Program untuk memenuhi urusan wajib ini adalah :

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, alokasi anggaran Rp.746.225.000,00 terealisasi Rp.737.368.810,00 atau 98,81%; dilaksanakan oleh Disbudparpora, Setda dan Kec. Cibeureum.

- b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, alokasi anggaran Rp.2.064.257.000,00 terealisasi Rp.1.639.178.500,00 atau 79,41%; dilaksanakan oleh Disbudparpora, Seluruh Kecamatan dan Setda.
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, alokasi anggaran Rp.8.709.965.500,00 terealisasi Rp.8.172.458.600,00 atau 93,83%; dilaksanakan oleh DCKTRK dan Disbudparpora.

19. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri.

Anggaran urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebesar Rp.13.747.551.000,00 dengan realisasi Rp.12.763.534.155,00 atau 92,84%. Program untuk memenuhi urusan wajib ini adalah :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.340.638.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.212.286.863,00 atau 62,32%; dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.469.890.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.437.885.772,00 atau 93,19%; dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol.
- c. Program Peningkatan Displin Aparatur, alokasi anggaran Rp.10.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.9.405.000,00 atau 94,05%; dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran Rp.23.500.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.20.900.000,00 atau 88,94%; dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol.
- e. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.7.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.6.100.000,00 atau 87,14%; dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol.
- f. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, alokasi anggaran Rp.3.127.440.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.938.891.495,00 atau 93,97%; dilaksanakan oleh Satpol PP dan Linmas, Kec. Tawang dan Kec. Purbaratu.
- g. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, alokasi anggaran Rp.331.000.000,00 terealisasi Rp.149.763.100,00 atau 45,25%; dilaksanakan oleh Satpol PP dan Linmas.
- h. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, alokasi anggaran sebesar Rp.4.361.102.000,00 terealisasi Rp.4.076.672.695,00 atau 93,48%; dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol, Setda dan seluruh Kecamatan.
- i. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat), alokasi anggaran Rp.200.000.000,00 terealisasi Rp.198.104.050,00 atau 99,05%; dilaksanakan oleh Kantor Satpol PP dan Linmas.
- j. Program Pendidikan Politik Masyarakat, alokasi anggaran Rp.3.003.000.000,00 terealisasi Rp.2.894.985.980,00 atau 96,40%; dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol.

- k. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, alokasi anggaran Rp.1.873.981.000,00 terealisasi Rp.1.818.539.200,00 atau 97,04%; dilaksanakan oleh BPBD.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian.

Anggaran urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sebesar Rp.195.654.107.403,40 dengan realisasi Rp.179.530.081.724,00 atau 92,45%. Program untuk memenuhi urusan wajib ini adalah :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.27.095.944.821,40 realisasi anggaran sebesar Rp.25.263.395.904,00 atau 93,24%; dilaksanakan oleh BKD, BPKBD, Setda, Sekretariat DPRD, Kecamatan, Dispenda, Inspektorat, Satpol PP, Sekretariat KORPRI.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.24.846.076.132,00 realisasi anggaran sebesar Rp.22.335.490.323,00 atau 89,90%; dilaksanakan oleh BKD, BPKBD, Setda, Sekretariat DPRD, seluruh kecamatan, Dispenda, Inspektorat, Satpol PP, Sekretariat KORPRI.
- c. Program Peningkatan Displin Aparatur, alokasi anggaran Rp.1.058.434.750,00 realisasi anggaran sebesar Rp.1.037.381.640,00 atau 98,01%; dilaksanakan oleh BKD, BPKBD, Setda, Sekretariat DPRD, Kec.Kawalu, Kec.Cihideung, Kec.Tawang, Kec.Cipedes, Kec.Purbaratu, dan Satpol PP.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, alokasi anggaran Rp.566.920.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.509.362.800,00 atau 89,85%; dilaksanakan oleh BPKBD, Sekretariat DPRD, Dispenda, Inspektorat, dan Sekretariat KORPRI.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran Rp.677.862.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.656.898.920,00 atau 96,91%; dilaksanakan oleh BKD, BPKBD, Setda, Sekretariat DPRD, seluruh kecamatan, Dispenda, Inspektorat, Satpol PP, dan Sekretariat KORPRI.
- f. Program Pengembangan Fasilitas dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, alokasi anggaran Rp.10.648.900.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.10.189.376.331,00 atau 95,68%; dilaksanakan oleh seluruh kecamatan.
- g. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.138.670.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.134.416.225,00 atau 96,93%; dilaksanakan oleh BKD, BPKBD, Setda, Sekretariat DPRD, seluruh kecamatan, Dispenda, Inspektorat, Satpol PP, dan Sekretariat KORPRI.

- h. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, alokasi anggaran Rp.16.438.142.500,00 terealisasi Rp.15.122.573.496,00 atau 92,00%; dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- i. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, alokasi anggaran Rp.546.825.000,00 terealisasi Rp.539.401.768,00 atau 98,64%; dilaksanakan oleh Setda.
- j. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, alokasi anggaran Rp.10.462.277.750,00 terealisasi Rp.9.787.516.821,00 atau 93,55%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag, Dinas Pendidikan, BPKBD, Setda, Sekretariat DPRD, dan Dispenda.
- k. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, alokasi anggaran Rp.2.447.690.000,00 terealisasi Rp.2.226.987.994,00 atau 94,41%; dilaksanakan oleh Inspektorat.
- l. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, alokasi anggaran Rp.75.740.000,00 terealisasi Rp.68.900.443,00 atau 90,97%; dilaksanakan oleh Inspektorat.
- m. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, alokasi anggaran Rp.1.843.181.000,00 terealisasi Rp.1.679.876.600,00 atau 91,14%; dilaksanakan oleh Dinkes, DBMPPE, Disdukcapil, Bappeda, BPMPPPT, Kesbangpol, Dispenda dan Seluruh Kecamatan.
- n. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, alokasi anggaran Rp.672.546.000,00 terealisasi Rp.566.974.403,00 atau 84,30%; dilaksanakan oleh Setda.
- o. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, alokasi anggaran Rp.2.523.219.000,00 terealisasi Rp.1.983.322.891,00 atau 78,60%; dilaksanakan oleh Setda dan BPKBD.
- p. Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, alokasi anggaran Rp.5.741.392.700,00 terealisasi Rp.5.497.082.426,00 atau 95,74%; dilaksanakan oleh Setda, Seluruh Kecamatan, Inspektorat, dan Satpol PP.
- q. Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintahan, alokasi anggaran Rp.14.493.630.000,00 terealisasi Rp.13.165.300.170,00 atau 90,84%; dilaksanakan oleh Setda, DCKTRK, Kec. Cibereum, dan Satpol PP.
- r. Program Fasilitasi Pengadaan Tanah Pemerintah, alokasi anggaran Rp.28.191.470.000,00 terealisasi Rp.24.450.045.557,00 atau 86,73%; dilaksanakan oleh Dinas BMPPE dan DCKTRK.
- s. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah anggaran Rp.2.233.001.000,00 realisasi Rp.1.879.583.663,00 atau 84,17%; dilaksanakan oleh Kesbangpol, dan Setda.

- t. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan, alokasi anggaran Rp.70.000.000,00 terealisasi Rp.66.225.000,00 atau 94,61%; dilaksanakan oleh BPMPT.
- u. Program Peningkatan Pelayanan Publik, alokasi anggaran Rp.2.116.614.000,00 terealisasi Rp.2.010.395.107,00 atau 94,98%; dilaksanakan oleh DBMPPE, Bappeda, Dishub, Disdukcapil, BPMPT, Kec. Cihideung dan Dispenda.
- v. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, alokasi anggaran Rp.4.633.397.200,00 terealisasi Rp.4.272.294.611,00 atau 92,21%; dilaksanakan oleh Disdik, Setda, Bappeda, Dinsosnakertrans dan Dinas KUMKM Perindag.
- w. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), alokasi anggaran Rp.8.803.445.400,00 terealisasi Rp.8.479.829.528,00 atau 96,32%; dilaksanakan oleh Dispenda, Setda dan seluruh Kecamatan.
- x. Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah, alokasi anggaran Rp.617.680.000,00 terealisasi Rp.588.263.793,00 atau 95,24%; dilaksanakan oleh BPKBD, Dispenda, Satpol PP dan Linmas.
- y. Program Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, alokasi anggaran Rp.638.076.750,00 terealisasi Rp.525.064.239,00 atau 82,29%; dilaksanakan oleh Bappeda, Setda dan BPKBD.
- z. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, alokasi anggaran Rp.15.494.820.500,00 terealisasi Rp.14.675.901.724,00 atau 94,71%; dilaksanakan Setda dan seluruh Kecamatan.
- ca. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, alokasi anggaran Rp.9.405.450.900,00 terealisasi Rp.8.782.100.047,00 atau 93,37%; dilaksanakan oleh Dinkes, Bappeda, BKD, Setda, Kec. Kawalu, Kec. Tamansari, Kec. Mangkubumi, Kec. Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes, Kec. Bungursari, BPMPT, Satpol PP, Korpri dan Dispenda.
- cb. Program Fasilitasi Prasarana Pelayanan Publik, alokasi anggaran Rp.3.172.700.000,00 terealisasi Rp.2.984.216.000,00 atau 94,06%; dilaksanakan oleh DCKTRK.

21. Urusan Ketahanan Pangan

Urusan wajib Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.480.000.000,00 terealisasi Rp.1.341.343.678,00 atau 90,63% yang dilaksanakan oleh Distankanhut dan Setda.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan melalui program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, alokasi anggaran Rp.824.196.000,00 terealisasi Rp.756.959.260,00 atau 91,84%. Program ini dilaksanakan oleh BKBMP3A, Kec. Kawalu, Kec. Mangkubumi, Kec. Cibereum, Kec. Indihiang, dan Kec. Cipedes.

23. Urusan Statistik

Urusan wajib Statistik dilaksanakan melalui program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah dengan alokasi anggaran Rp.105.000.000,00 terealisasi Rp.93.255.000,00 atau 88,81%. Program ini dilaksanakan oleh Dinkes.

24. Urusan Kearsipan.

Urusan wajib Kearsipan dianggarkan sebesar Rp.1.674.798.750,00 dengan realisasi Rp.1.579.758.183,00 atau 94,33%. Program untuk memenuhi urusan wajib ini sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.531.776.750,00 realisasi anggaran sebesar Rp.501.295.853,00 atau 94,27%; dilaksanakan oleh Karpusda.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.271.845.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.257.257.150,00 atau 94,63%; dilaksanakan oleh Karpusda.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp.6.250.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.6.237.000,00 atau 99,79%; dilaksanakan oleh Karpusda.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, alokasi anggaran Rp.66.800.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.66.792.000,00 atau 99,99%; dilaksanakan oleh Karpusda.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran Rp.25.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.24.990.000,00 atau 99,96%; dilaksanakan oleh Karpusda.
- f. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.7.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.7.000.000,00 atau 100%; dilaksanakan oleh Karpusda.
- g. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan dengan anggaran Rp.337.000.000,00 realisasi Rp.316.947.080,00 atau 94,05%; dilaksanakan oleh Karpusda.
- h. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah dengan anggaran Rp.50.000.000.000,00 realisasi Rp.49.637.000,00 atau 99,27%; dilaksanakan oleh Karpusda dan Setda.
- i. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasidengan anggaran Rp.351.000.000,00 realisasi Rp.349.602.100,00 atau 99,60%; dilaksanakan oleh Setda.

25. Urusan Komunikasi Dan Informatika.

Urusan wajib komunikasi dan informatika alokasi anggaran sebesar Rp.16.299.631.000,00 dengan realisasi Rp.15.508.937.035,00 atau 96,88%. Program untuk memenuhi urusan wajib ini adalah :

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, alokasi anggaran Rp.11.299.631.000,00 terealisasi Rp.10.857.978.470,00 atau 96,09%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo dan Setda.

- b. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi, alokasi anggaran Rp.172.740.000,00 terealisasi Rp.165.137.545,00 atau 95,60%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.
- c. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa, alokasi anggaran Rp.4.536.138.000,00 terealisasi Rp.4.485.821.020,00 atau 98,89%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo, Sekretariat DPRD dan Setda.

26. Urusan Perpustakaan

Urusan wajib Perpustakaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.545.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.5.283.188.725,00 atau 95,28%; dilaksanakan oleh Karpusda, melalui program :

- a. Program pengembangan Budaya Baca, alokasi anggaran Rp.10.000.000,00 terealisasi Rp.9.907.000,00 atau 99,07%;
- b. Program pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan, alokasi anggaran Rp.5.535.000.000,00 terealisasi Rp.5.273.281.725,00 atau 95,27%

2) **Permasalahan dan Solusi**

Berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama tahun anggaran 2016, terdapat berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. **Pendidikan**

Permasalahan :

- a. Angka rata-rata lama sekolah masih rendah.
- b. Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai.

Solusi :

- a. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan dasar, meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, pembinaan dan pencegahan siswa rawan DO.
- b. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan melalui penyediaan anggaran baik yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan APBN serta pemberdayaan Komite sekolah, partisipasi masyarakat dan sektor swasta melalui CSR.

2. **Kesehatan**

Permasalahan :

- a. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu mencapai 134,73 per 100.000 kelahiran dengan kematian sebanyak 16 kasus dari 13.729 kelahiran.
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Solusi :

- a. Untuk mengurangi angka kematian ibu telah dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kompetensi dan pemetaan bidan, validasi SOP khususnya mengenai Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta meningkatkan koordinasi dengan sarana pelayanan kesehatan swasta. Selain itu direncanakan akan dibangun Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).
- b. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin telah dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, pengintegrasian peserta JAMKESDA ke BPJS Kesehatan, peningkatan koordinasi dengan BPJS dan Rumah Sakit Swasta serta penyediaan dana JAMKESDA bagi masyarakat miskin diluar peserta BPJS Kesehatan.

3. Pekerjaan Umum

Permasalahan :

- a. Sebagian jaringan jalan di Kota Tasikmalaya belum dilengkapi dengan saluran drainase dan trotoar.
- b. Terdapat beberapa area yang mengalami genangan ketika hujan lebat.

Solusi :

- a. Dilakukan pembangunan dan pemeliharaan trotoar dan drainase, serta pembangunan jalan dilakukan secara simultan dengan penunjangnya.
- b. Optimalisasi fungsi drainase dan normalisasi saluran air dan sungai.

4. Perhubungan

Permasalahan :

- a. Akses transportasi angkutan umum masih belum menjangkau seluruh wilayah Kota Tasikmalaya.
- b. Jumlah fasilitas lalu lintas (Rambu, Marka, APPIL, PJU dan lain-lain) belum sesuai kebutuhan.
- c. Terjadi kemacetan di beberapa titik pada waktu tertentu.

Solusi :

- a. Perubahan dan penambahan rute trayek angkutan dan pembangunan terminal Tipe C
- b. Penambahan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas terus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan.
- c. Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas.

5. Perumahan dan Permukiman

Permasalahan :

- a. Masih banyak rumah tangga yang belum bersanitasi baik.
- b. Masih tingginya kebutuhan masyarakat akan rumah tinggal (backlog perumahan).
- c. Masih cukup luas kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani.
- d. Belum optimalnya penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan formal dari pengembang ke Pemerintah Daerah.

Solusi :

- a. Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat/komunal, peningkatan sosialisasi tentang PHBS kepada masyarakat dan pembangunan jamban sehat bagi rumah tangga.
- b. Penyediaan perumahan layak huni bagi masyarakat melalui bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), stimulan pembangunan rumah baru untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan memfasilitasi pembangunan perumahan oleh pengembang swasta.
- c. Pengurangan luas kawasan permukiman kumuh melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur permukiman baik yang didanai dari APBD Kota, bantuan keuangan provinsi, maupun bantuan pemerintah.
- d. Terus meningkatkan koordinasi dalam pendataan serta verifikasi Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) pada perumahan yang telah terbangun untuk kemudian memfasilitasi proses serah terima dari pengembang kepada pemerintah daerah.

6. Penataan Ruang

Permasalahan :

- a. Belum tersedianya regulasi tentang penataan pemanfaatan ruang secara detil.
- b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang.
- c. Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau/Ruang Publik.

Solusi :

- a. Telah ditetapkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- b. Dilakukan sosialisasi tentang tata ruang melalui media cetak maupun elektronik.
- c. Penambahan dan pembangunan RTH diantaranya pembangunan taman warga, penataan median dan pulau jalan, pembangunan taman depan Mesjid Agung dan pembebasan bukit sampai dengan saat ini sudah mencapai 63.397M2.

7. Lingkungan Hidup

Permasalahan :

- a. Pengelolaan persampahan masih belum optimal.
- b. Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup belum optimal.

Solusi :

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan antara lain pengadaan armada dan sewa alat berat, pengelolaan sampah dengan Sistem 3R (reuse, reduce, recycle), penguatan SDM, kelembagaan pengelola sampah, optimalisasi TPSA Ciangir dan direncanakan Pemetaan dalam rangka Pengelolaan sampah mulai dari hulu ke hilir.
- b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup melalui pengadaan dan pemeliharaan alat uji kualitas lingkungan, pengawasan lingkungan terhadap objek yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.

8. Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan :

Belum tercapainya target persentase kepemilikan akta kelahiran dan kematian karena belum terupdatenya database kepemilikan akta kelahiran secara keseluruhan. Hal ini disebabkan :

- a. pelayanan akta kelahiran atau kematian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kota Tasikmalaya baru dilaksanakan Tahun 2012, sedangkan sebelumnya masih menggunakan pencatatan secara manual.
- b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan dokumen catatan sipil dimana mereka membuat dokumen hanya ketika diperlukan saja.

Solusi :

Optimalisasi Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan, updating database akta kelahiran, sosialisasi pentingnya kepemilikan akta kelahiran dari mulai tingkat bawah serta direncanakan akan dilaksanakan kegiatan sensus kepemilikan akta kelahiran.

9. Sosial

Permasalahan :

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum optimal khususnya: anak jalanan, gelandangan dan pengemis (GEPENG), penyandang disabilitas, ODHA (Orang Dengan HIV AIDS).

Solusi :

Untuk mengoptimalkan penanganan PMKS yang ada di Kota Tasikmalaya dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang kurang memadai maka penanganan yang dilakukan antara lain :

- Bekerjasama dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial atau Panti-Panti Sosial Masyarakat sesuai dengan jenis permasalahan dan kebutuhan penanganannya.
- Pembinaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, diantaranya :
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
 - b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
 - c. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan bagi PMKS.
- Untuk pedoman pelaksanaan kegiatan menggunakan ketentuan aturan/juklak juknis dari pusat dan provinsi dan menyiapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya kualitas SDM perkoperasian dan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi.
- b. Kurangnya kualitas SDM dan produk hasil UKM serta terbatasnya akses UKM terhadap permodalan.

Solusi :

- a. Merevitalisasi koperasi melalui pembinaan agar koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif dan mensosialisasikan gerakan masyarakat sadar koperasi (GEMASKOP) di Kota Tasikmalaya serta mendorong koperasi agar melaporkan pelaksanaan RAT setiap tahun.
- b. Melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap pelaku UKM serta memfasilitasi akses UKM terhadap permodalan baik berupa pemberian bantuan modal kerja maupun chaneling dengan perbankan.

11. Perdagangan

Permasalahan :

- a. Berkembangnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum tertata dengan baik.
- b. Maraknya pendirian toko modern/mini market yang belum memiliki ijin.
- c. Kurangnya kesadaran pelaku UMKM untuk memiliki ijin usaha.

Solusi :

- a. Melakukan pendataan, penataan dan pemberdayaan PKL di beberapa lokasi seperti di komplek Dadaha dan jalan Cihideung.
- b. Sejak diberlakukannya peraturan daerah 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, kami terus melakukan pembinaan kepada minimarket serta toko modern sekaligus mensosialisasikannya, agar pelaku usaha yang bergerak dalam usaha toko modern senantiasa berpedoman terhadap Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan perda no. 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sampai sekarang masih memproses IUTM bagi Minimarket.

- C. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya aspek legalitas bagi usaha dan mempermudah prosedur perijinan melalui perijinan online.